



Pengaruh *Management Resources* DPMPD Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kediri Masa Pandemi Covid-19

Moh. Hamzah Fansuri^{1*}, Sutinah², Septi Ariadi³

^{1,2&3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya

*email : hamzahfansuri268@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study focuses on the influence of the level of DPMPD resource management on the successful implementation of community empowerment programs in Kediri Regency during the Covid-19 pandemic where the background of the pandemic is changing the system and empowerment that demands resource management to continue to empower the community in Kediri Regency. This study uses a quantitative approach that uses data collection techniques with questionnaires (Likert scale), observation, interviews, and documentation. Sampling in this study used a random sampling technique to DPMPD employees and participants who took part in the training. The results of the analysis of the influence of DPMPD management resources on the successful implementation of community empowerment programs in Kediri Regency during the Covid-19 pandemic showed a significance level of 0.00 and R square of 0.659 and the equation value which showed a positive value so that it could be interpreted that there was a significant and positive influence. resource management on the success of the implementation of the empowerment program that is equal to 65.9%.*

Keywords: *DPMPD, Success, Resources Management, Empowerment Program*

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat sebagai wujud nyata dalam merealisasikan konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan (Endah,2020:137). Hal ini untuk mempersiapkan masyarakat dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya (Izzudidin,2022: 558). Desa sendiri berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan khususnya di lingkungan desa, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat (Hermawan, 2021: 191). Dimana segala urusan baik yang berkaitan dengan administrasi dan bahkan untuk memajukan kesejahteraan melalui hal tersebut. Sehingga perlu memberikan perhatian khusus terhadap perkembangannya (Khoeriyah, 2018:102). Hal ini sejalan dengan konsep pendekatan pembangunan melalui *bottom up* dengan fokus pembangunan dari bawah baik dari fisik maupun manusianya (Amin,2020: 9).

Namun pandemi covid-19 mampu merubah tatanan masyarakat tak terkecuali pada masyarakat desa. Tidak sedikit program pemberdayaan yang dijalankan terhambat dan bahkan beralih fungsi dengan program yang mengutamakan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat guna membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak pandemi berkepanjangan. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa diantaranya yaitu; Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa serta Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa. Selain itu, Perpres No. 104 Tahun 2021, pada pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya sebagai berikut:

“program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); dukungan pendanaan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan Program sektor prioritas lainnya.”

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji mengenai program pemberdayaan pada masyarakat desa karena menyangkut keberhasilan desa dalam mengelola sumber daya masyarakat desa. Keberhasilan program atau masih perlu adanya evaluasi program kerja bergantung dari kesiapan seluruh elemen terkait.

Keberhasilan pembangunan desa sendiri bukan hanya terletak pada kemampuan pemerintahan desa saja dalam berbagai macam program yang mampu dijalankan, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan tersebut. Menurut Huraerah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi (Rudiadi,2021: 51). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat serta elemen pemerintahan desa merupakan hal yang vital dalam menjalankan program tersebut. Selain partisipasinya, kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa juga diperlukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta tanggungjawab pemerintah desa masing-masing dalam melaksanakan segala program kerja. Ketentuan perundang-undangan juga secara tegas mengatur peran serta masyarakat sebagai *social control* secara optimal (Noor, 2011: 89).

Kediri menjadi salah satu kabupaten yang berhasil melaksanakan program pemberdayaan sebelum bencana covid-19 melanda. Keberhasilan tersebut bukan tanpa sebab, dimana jumlah penduduk produktifnya tergolong tinggi dibandingkan penduduk yang sudah lansia dan ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemberdayaan di Kabupaten Kediri. Berdasarkan catatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 1.673.569 jiwa yang terdiri atas 846.441 jiwa penduduk laki-laki dan 827.128 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan angka tahun 2019, penduduk Kabupaten Kediri mengalami pertumbuhan sebesar 0,67%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kediri tahun 2020 mencapai 1.098 jiwa/km². Kecamatan Ngasem merupakan kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk 2.726 jiwa/km². Berdasarkan kelompok usia, komposisi penduduk Kabupaten Kediri tahun 2020 terdiri atas 21,60% penduduk berusia 0-14 tahun, 59,53% berusia 15-54 tahun, dan 18,87% berusia 55 tahun ke atas. 6. Hasil SP2020 mencatat mayoritas

penduduk Kabupaten Kediri didominasi oleh generasi Z, generasi X dan generasi Milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 25,44 % dari total populasi (412.721 jiwa), generasi X sebanyak 23,96% dari total populasi (391.816 jiwa), generasi Milenial sebanyak 23,56% dari total populasi (385.325 jiwa).

Namun pada umumnya masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang terjadi di lapangan antara lain: pengurangan anggaran dana desa dengan prioritas untuk aspek yang berkaitan pandemi, belum adanya kesiapan *stakeholder* dalam *new policy* masa pandemi, sistem yang berubah dan lainnya. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui, menganalisis dan memaparkan mengenai pengaruh kebijakan baru terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kediri pada masa pandemi covid 19 untuk menuju desa yang mandiri dan maju.

B. METODE

Metode ini menggunakan kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif (*Mixed Method*) dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui mengenai program pemberdayaan di lingkup DPMPD Kabupaten Kediri namun untuk mengukur keberhasilan program tersebut dengan menggunakan instrumen kuantitatif dalam penelitian ini fokus pada para pegawai DPMPD Kab. Kediri, Kepala Desa serta para pengelola BUMDES dan PKK dalam program pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Kediri. Lokasi penelitian ini terletak Kabupaten Kediri tepatnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD).

Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan memperhatikan jenis analisis data, teknik statistik, rumus dan kriteria pengujian hipotesis (Priyanto,2009: 157). Pada penelitian ini, teknik yang peneliti terapkan adalah analisis inferensial. Teknik tersebut menganalisis hubungan antar variabel menggunakan uji hipotesis. Kemudian, hasil tersebut peneliti simpulkan.

Sebelum peneliti menguji hubungan antar variabel tersebut, peneliti menguji validitas dan reliabilitas instrument berupa angket. Angket tersebut peneliti susun dari indikator-indikator sehingga validitasnya haurs peneliti pastikan terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis.

Pengujian pengaruh pada tingkat *management resources* DPMPD terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kediri pada masa pandemi covid-19 maka peneliti menggunakan uji t yang digunakan untuk menguji hipotesis. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan analisis regresi linier sederhana. Pemilihan responden menggunakan *simple random sampling*. Data yang diperoleh diuji keabsahannya menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, serta regresi linier.

Adapun dua macam hipotesis dalam penelitian ini yaitu, hipotesis *management resources* yang dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol yang dinyatakan dalam kalimat negatif:

Hi yaitu Terdapat pengaruh pada tingkat *management resources* DPMPD terhadap Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kediri pada masa pandemi covid-19. Sedangkan Ho, Tidak Terdapat pengaruh pada tingkat *management resources* DPMPD terhadap Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kediri pada masa pandemi covid-19.

Dalam menganalisis dan mengidentifikasi *management resources* terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan, peneliti menggunakan teori struktural fungsional yang dilakukan oleh DPMPD dalam melaksanakan program pemberdayaan dengan melalui beberapa konsep, yaitu:

1. *Management resources* (Variabel X)

Gambaran suatu keadaan di lingkungan DPMPD dalam melaksanakan program pemberdayaan guna melihat perbedaan *management resources* dinas terkait dalam melaksanakan pemberdayaan dari masa sebelum dan masa pandemi Covid 19, dimana memfokuskan sumber daya terkait yang mengalami perubahan pelaksanaan serta pelaksanaan di masa pandemi namun hal ini dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan. Pola yang dilakukan dalam pengukuran ini dengan melihat tingkat keberhasilan dalam menjalankan program kerja secara berkala.

2. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (Variabel Y)

Suatu keadaan yang menggambarkan akibat dampak pandemi covid-19 yang melanda semua aspek, salah satunya pada program pemberdayaan dimana sempat terjadi kebingungan dalam melaksanakan program yang mengharuskan untuk tidak tatap muka dan alokasi dana difokuskan untuk bantuan covid-19. Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan merupakan konsep peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan (LaksonoNasyikhatur,2019: 1). Parsons, dikutip oleh Hermawan dkk (2021: 193) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses seseorang beradaptasi dan memperkuat diri terlibat dalam beragam kontrol, pengaruh, serta lembaga. Pemberdayaan juga merupakan proses untuk mengasah keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan individu. Dengan keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang baik, individu tersebut dapat mengarahkan hidupnya dan mempengaruhi hidup individu lain.

Merriam Webster mendefinisikan pemberdayaan dalam 2 pengertian, yaitu: a. Sebagai pemberian kesanggupan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu; b. Berkenaan dengan kuasa. Pemberdayaan memiliki sejumlah poin penting, yaitu: proses pembangunan, inisiatif masyarakat, dan perbaikan diri sendiri.

Suatu program yang berhasil atau dapat memberdayakan masyarakat memerlukan keaktifan pihak pemberdaya dan pihak yang diberdayakan. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan dan memperbaiki situasi. Peningkatan tersebut juga diperlukan dalam pembangunan dan kemanusiaan. Cambodian Children's trust,

pada tahun 2007, menerapkan proses untuk menyadarkan masyarakat dengan menyediakan berbagai cara dan kesempatan pemberdayaan (Desbiolles, 2022: 1).

Menurut Adisasmita dalam Silviana dkk (2021:42) partisipasi masyarakat diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan keikutsertaan dan kegiatan merencanakan dan melaksanakan program atau proyek pembangunan. Salah satu bentuk upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi adalah melalui pemberdayaan masyarakat berbasis literasi (Nur at.al,2022: 11). Sirkulasi ekonomi dalam mendukung potensi lokal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi covid-19 mengembangkan potensi lokal sebagai pemulihan di bidang ekonomi (Sukmawati & Rina,2021: 325).

Sumodiningrat, dikutip oleh Kurniawati (2021:10-11), menjelaskan tiga macam usaha pemberdayaan masyarakat. Usaha pertama adalah *enabling* atau membentuk suasana agar masyarakat mengembangkan potensinya. Kedua, adalah usaha *empowering* atau memperkuat potensi dan daya masyarakat. Usaha ketiga adalah melindungi atau *protecting*. Usaha-usaha pemberdayaan tersebut mampu mewujudkan masyarakat mandiri dan bebas kemiskinan serta keterbelakangan.

Konsep pemberdayaan umumnya berhubungan dengan konsep kemandirian, keterlibatan, jejaring, dan keadilan. Pemberdayaan setidaknya membutuhkan empat unsur yaitu modal, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan pelatihan dengan memanfaatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kota (Subiyakto et al, 2022: 1).

Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin dan lembaga mereka dengan memastikan keamanan lingkungan dan mata pencaharian. Penting untuk melaksanakan proyek-proyek masyarakat, membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga meningkatkan kinerja lingkungan, metode pertanian, dan situasi mata pencaharian (Zikargae at.al,2022: 1). Pemerintah desa sebagai pembuat kebijakan diharapkan mampu membuat perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang juga merupakan aspek pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini akseslah yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dalam akses kesehatan, pendidikan, politik, dan juga sektor ekonomi yang kemudian dapat mengurangi faktor kemiskinan di masyarakat (Sen dalam Sutopo,2022: 61).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas bermanfaat untuk memastikan keabsahan instrumen penelitian berupa angket. Peneliti menguji validitas instrumen menggunakan Pearson Correlation berbantuan software pengolah data, SPSS, dengan taraf signifikansi 0.05 (Priyanto,2009). Bila hasil r-hitung lebih besar dari r-tabel, maka item-item pada angket memiliki hubungan yang signifikan atau valid. Namun, bila nilai r-hitung lebih kecil dari r-tabel, maka item-item tersebut tidak berhubungan secara signifikan atau tidak valid. Pada penelitian ini, N sebesar 100 dengan taraf signifikansi 0.05 atau 5%. Jadi, nilai r-tabel yang peneliti peroleh adalah 0.23. Oleh karena itu, item-item angket dinyatakan valid apabila r-hitung lebih besar dari 0.23. Hasil analisis uji validitas dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Korelasi (N = 100)

Item	Pearson	Sig (2-tailed)
X1	.661**	.000
X2	.630**	.000
X3	.379**	.039
X4	.564**	.001
X5	.146	.441
X6	.689**	.000
X7	.618**	.000
X8	.700**	.000
X9	.634**	.000
X10	.735**	.000
X11	.796**	.000

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Item	Pearson	Sig (2-tailed)
Y1	.470**	.009
Y2	.865**	.000
Y3	.827**	.000
Y4	.940**	.000
Y5	.878**	.000
Y6	.839**	.000
Total	1	

Sumber:Data Diolah,2022

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji untuk memastikan ketepatan suatu alat ukur penelitian. Ketetapan atau konsistensi sangat penting sebab alat ukur tersebut nantinya peneliti gunakan untuk mengukur lebih dari satu subjek. Oleh karena itu, suatu alat ukur harus memiliki hasil yang tetap bila digunakan pada beragam subyek. Uji reliabilitas ini peneliti lakukan menggunakan nilai Cronbach Alpha. Proses pengolahan data tersebut peneliti lakukan menggunakan SPSS. Kriteria angket yang reliabel adalah:

- a. Nilai alpha lebih besar dari nilai r-kritis product moment
- b. Nilai Cronbach Alpha memenuhi kriteria "dapat diterima," $0.7 \leq \alpha < 0.8$; atau "baik," $\alpha \geq 0.8$.

Tabel 2 menunjukkan hasil uji reliabilitas.

Tabel 2. Uji Reliabelitas Variabel X dan Y

Variabel	Nilai Alpha Cronbuch	Keterangan
Management Resources (X)	0,986	Reliabel
Keberhasilan Pelaksanaan Pemberdayaan (Y)	0,887	Reliabel

Sumber: Data Diolah,2022

Tabel 2 menunjukkan nilai Cronbach Alpha angket variabel X dan Y berturut-turut 0.986 dan 0.887, lebih besar dari 0.8. Oleh karena itu reliabilitas angket tersebut adalah “baik.” Jadi, angket dapat peneliti gunakan pada penelitian ini.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji untuk memastikan data yang peneliti kumpulkan dari suatu sampel berdistribusi normal. Uji tersebut peneliti lakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Data yang berdistribusi normal memiliki indikasi nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, 5%.

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^A	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.23273452
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.108
	Negative	-.131
Test Statistic		.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Diolah,2022

Tabel 3 menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.200, lebih besar dari 0.05. Nilai tersebut menunjukkan data yang peneliti kumpulkan berdistribusi normal sehingga penelitian peneliti lanjutkan menggunakan analisis regresi.

4. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana berguna untuk memastikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS 24 untuk melakukan uji. Hasil uji regresi sederhana peneliti sajikan menggunakan Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Uji Regresi Linear Sederhana SPSS Versi 24

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.812 ^a	.659	.647	2.27226

Sumber: Data Diolah,2022

Tabel 4 merupakan output uji regresi sederhana menggunakan SPSS versi 24. Nilai koefisien determinasi, R-square, sebesar 0.659, menunjukkan variabel bebas atau management resource berkontribusi terhadap variabel terikat, keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan, sebesar 65.9%. Sisa persentase yang ditemukan, yaitu 34.1% menunjukkan besar kontribusi faktor-faktor yang peneliti tidak amati di dalam model regresi sederhana ini.

Tabel 5. Hasil Analisis Uji Regresi Linear Sederhana SPSS Versi 24 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	279.732	1	279.732	54.179	.000 ^b
	Residual	144.568	28	5.163		
	Total	424.300	29			

Sumber: Data Diolah,2022

Tabel 4 menunjukkan nilai sig sebesar 0.000, kurang dari 0.05, menunjukkan pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y. Jadi, management resources memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan.

Tabel 6. Hasil Analisis Uji Regresi Linear Sederhana SPSS Versi 24

		Coefficients				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.979	2.926		.676	.504
	management resources	.300	.041	.812	7.361	.000

Sumber: Data Diolah,2022

Persamaan regresi dapat peneliti susun berdasarkan output Tabel 6 atau output koefisien sehingga persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 1,979 + 0,300X$$

Persamaan tersebut menunjukkan nilai konstanta adalah 1.979 atau nilai konsistensi *management resource* adalah 1.979. Di sisi lain, nilai koefisien regresi X adalah 0.300. Nilai tersebut menunjukkan setiap 1% peningkatan pelaksanaan pemberdayaan, keberhasilan pegawai meningkat sebesar 0.300. Nilai koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga arah pengaruh X terhadap Y juga positif.

Secara umum, hasil uji regresi linear sederhana tersebut memutuskan bahwa:

- 1) Nilai signifikansi, menurut Tabel Coefficient, sebesar 0.00, kurang dari 0.05, menunjukkan pengaruh management resource (X) terhadap keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan (Y) DPMPD Kabupaten Kediri.
- 2) Nilai t yang peneliti peroleh menunjukkan t-hitung = 7.361, lebih besar dari t-tabel, 0.23. Jadi, variabel management resource (X) berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan (Y) DPMPD Kabupaten Kediri.

Pelaksanaan Pemberdayaan di Kabupaten Kediri

Proses pemberian pelatihan yang dilakukan oleh pegawai atau panitia yang ditunjuk pada umumnya mampu berjalan dengan lancar, namun pada beberapa kuesioner menjelaskan bahwa ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan secara online diantaranya: terkendala terhadap jaringan, kurang efisien dalam menerangkan materi serta pendapat lainnya. Hal ini menjadi salah satu yang harus diselesaikan oleh manajemen resources BPMPD supaya pelaksanaannya dapat terlaksana dengan optimal. Bapak Aggelio Berlian menjelaskan bahwa bagi para peserta yang kurang paham biasanya ada pendampingan yang akan dibantu oleh pihak terkait supaya mampu menguasai dan paham pembekalan atau materi yang telah disampaikan oleh pemateri.

Wujud implementasi yang dilakukan oleh DPMPD Kabupaten Kediri dalam meningkatkan *manajemen resources* yakni adanya *upgrading* yang dilakukan dengan bertukar inspirasi ke DPMPD yang ada di dalam maupun di luar daerah dan dianggap sukses dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional. Selain itu, sikap kreatif dan inovatif dari pegawai juga sangat membantu dalam meningkatkan *manajemen resources* tata kelola di kantor BPMPD Kabupaten Kediri. Dari hal itulah yang menjadikan pegawai BPMPD mampu melaksanakan program kerja pada masa pandemi yang bisa dikatakan berhasil.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Talcott Parson. Talcott Parson menjelaskan model perkembangan fungsionalisme menuntut seluruh unsur untuk berfungsi dengan baik sehingga masyarakat pun dapat melaksanakan fungsinya (Raho,2007: 167). Suatu masyarakat memiliki integrasi kesepakatan yang berasal dari anggota masyarakat tersebut berdasarkan nilai-nilai yang mereka anut. Jadi, integrasi tersebut mampu memecahkan perbedaan dan dapat menjaga keseimbangan.

Masyarakat sebenarnya terbentuk dari beragam sistem sosial. Sistem-sistem tersebut saling berhubungan dan bergantung satu sama lain (Grathoff,2000: 2224). Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Menafsirkan struktur yang memiliki keterkaitan mengenai kebijakan (peraturan baru) dalam alokasi dana desa yang berdampak pada keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan pada masyarakat di Kabupaten Kediri.

Management Resources mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Pemberdayaan melalui Konsep Imperatif Fungsional

Peneliti menggunakan teori Talcott Parsons tentang struktural fungsional, teori konsep imperative fungsional atau AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency*), serta keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan menurut management resource DPMPD Kabupaten Kediri untuk menganalisis.

Pertama *Adaptation*, yaitu proses adaptasi pelaksanaan pemberdayaan pada masa pandemi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat mampu beradaptasi mengikuti kegiatan pemberdayaan khususnya jika pelatihan/pembinaan dilaksanakan secara daring yang biasanya menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Hasil penelitian dalam pelatihan masa pandemi tergolong berhasil dimana masyarakat mampu melaksanakan dengan baik program pemberdayaan walaupun pada mulanya perlu

adanya pembinaan secara teknis dalam menggunakan aplikasi yang dipakai saat pelatihan secara online tersebut. Namun dengan berjalannya proses dan adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat yang diberdayakan mampu berjalan dengan baik program tersebut. Upaya tersebut sejalan dengan teori adaptasi Talcott Parson, yaitu masyarakat mampu beradaptasi dengan sistem atau lingkungan (Prasetya et al., 2021: 64)



Gambar 1. Teori konsep imperatif fungsional Talcott Parsons

Kedua, *Goal Attainment*, yaitu tujuan dalam pemberdayaan khususnya yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan salah satu intervensi yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan yang diambil dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini untuk mempersiapkan masyarakat desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya (Amali,2021:221). Di dalam tahap ini DPMPD memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan dari Pemerintah Kabupaten atau bahkan nasional dapat diturunkan di dalam visi misinya. Tujuan-tujuan tersebut direncanakan dan dihitung secara rinci dan tepat menjadi visi BPMPD yaitu “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas , Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional.”

Pada penelitian ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menjalankan misi berupa “memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.”

Ketiga, *integration* atau keselarasan sistem sosial. Tahap ini proses integrasi pemberdayaan membutuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat di Kabupaten Kediri. Pengintegrasian pemberdayaan dapat berupa kegiatan BUMDes, PKK, atau kegiatan lain. Proses integrasi tersebut akan menjadi pembiasaan dengan menerapkan kegiatan-kegiatan pengembangan berbasis alam maupun berorientasi manusia.

Proses integrasi juga menjadi pendorong pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan DPMPD Kabupaten Kediri ada terintegrasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang terstruktur. Pengintegrasian ini ditunjukkan oleh kemampuan mengatasi permasalahan pandemi dengan sigap sesuai dengan ketentuan dan mampu mengatasi masa

pandemi dalam menjalankan pemberdayaan. Proses integrasi ini juga membutuhkan kerjasama para anggota sistem sosial atas dasar kesepakatan nilai dan norma yang diterapkan (Turama, 2020: 65).

Keempat adalah *latency* atau pemeliharaan penerapan pemberdayaan. Tahap ini memastikan pelaksanaan pemberdayaan berkesinambungan sehingga masyarakat mampu mempraktikkannya. Penerapan tersebut memerlukan strategi berkelanjutan dan strategi kolaborasi dengan para *stakeholder*. Segala macam bentuk kegiatan pemberdayaan yang baik harus dikembangkan dan dilaksanakan rutin setiap tahun. Usaha tersebut bertujuan untuk memelihara pola dan nilai-nilai masyarakat, seperti bahasa, norma, aturan, dan sebagainya (Turama, 2020: 23). Oleh karena itu, usaha ini perlu keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan proses internalisasi pemberdayaan yang diterapkan. Begitu pula masyarakat sebagai tempat bersosialisasi pemberdayaan harus mampu menyediakan yang mendukung proses internalisasi sesuai dengan keadaan masyarakat.

Sistem yang dibentuk dalam Pemberdayaan

Parson mendefinisikan sistem yang muncul akibat pemberdayaan, berdasarkan aksi sosial, sebagai unit tenaga masyarakat. Unit tersebut muncul dari aksi suatu sistem yang mana aksi tersebut muncul dari diri seseorang. Unsur ini, diri seseorang, memiliki dua aspek: kegembiraan dan orientasi. Parsons menyebut kegembiraan sebagai "*cathetic*" sementara orientasi sebagai kognisi. Dua aspek tersebut merupakan aksi manusia untuk menunjukkan hasrat dan ide mereka. Kedua hal tersebut dapat peneliti analisis menggunakan keinginan, ide, nilai, serta norma. Sistem aksi tersebut tiga bentuk sistem, yaitu sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem kebudayaan.

1. Sistem Sosial

Parsons menyatakan bahwa konsep sistem menunjuk pada dua hal. *Pertama*, Saling ketergantungan antara bagian, komponen, dan proses yang meliputi keteraturan-keteraturan yang dapat dilihat seperti halnya dalam DPMPD untuk melaksanakan program ini saling adanya keterkaitan dan ketergantungan antar divisi. *Kedua*, Sebuah tipe yang sama dari ketergantungan antara beberapa kompleks dan lingkungan yang mengelilinginya. Sementara itu, batasan tentang konsep sistem sosial hampir dibuat secara beragam dalam setiap tulisan Parsons dalam kurun waktu yang berbeda. Pembagian sistem implementasi ini juga berlaku dalam lingkungan DPMPD sebagai bentuk menjalin *manajemen resources* antar pegawai dengan aspek, output yang dijalankan berbeda namun saling keterkaitan antara satu sama lain.

Sistem sosial memerlukan pemahaman batasan-batasan sistem sosial. Batasan tersebut antara lain adalah: hubungan antar aktor atau hubungan antar jaringan; kerangka konseptual penghubung tindakan seseorang dan ragam situasi; persepsi pelaku terhadap alat dan tujuan yang berasal dari kepercayaan, norma, dan nilai terorganisir pada suatu harapan; peran sosial pelaku untuk berperilaku; dan hubungan terhadap beragam peran sosial. Parsons menganalisis sistem sosial dengan memperhatikan hubungan antar aktor dan struktur sosial. Suatu pola nilai dapat terjaga dengan baik apabila nilai tersebut terintegrasi pada sistem. Proses integrasi tersebut disebut dengan proses internalisasi dan sosialisasi.

Strategi pengalihan norma dan nilai sosial pada aktor pada suatu sistem sosial menyebabkan aktor atau pelaku "sadar." Kesadaran tersebut, terutama kesadaran terhadap kepentingan diri aktor, menyebabkan aktor atau pelaku memberikan pengabdian pada kepentingan suatu sistem. Proses ini menjadi satu kesatuan. Sosialisasi dan kontrol sosial merupakan mekanisme yang dapat membuat sistem sosial tetap seimbang. Keseimbangan tersebut dapat mengakomodasi individualitas, penyimpangan, dan bentuk ekstrim dari individualitas dan penyimpangan agar dapat mewujudkan keteraturan sosial.

Sistem sosial terbentuk dari berbagai actor individual. Aktor-aktor tersebut berinteraksi melalui aspek lingkungan dan fisik. Aktor atau pelaku dengan motivasi memiliki tendensi untuk memaksimalkan kepuasan sesuai dengan pemahaman situasi diri mereka. Tendensi tersebut juga dimediasi oleh sistem symbol terstruktur secara kultural. Jadi, pengertian tersebut menerapkan konsep-konsep Parson tentang sistem sosial, mulai dari actor, interaksi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan, dan kultur.

2. Sistem Kultural

Parson menjelaskan kultur sebagai kekuatan utama untuk mengikat segala macam unsur dunia sosial. Kekuatan tersebut juga mengikat sistem tindakan dan menjadi komponen sistem lain. Oleh karena itu, realisasi sistem sosial dapat berupa norma dan nilai yang diinternalisasikan oleh actor.

Sistem kultural memiliki keberadaan terpisah. Bentuk keberadaan sistem tersebut antara lain pengetahuan, symbol-simbol, dan gagasan sehingga sistem kultural bukan semata-mata menjadi bagian sistem lain. Ketiga aspek tersebut juga dapat diamati pada sistem sosial dan sistem personalitas namun bukan berarti aspek-aspek sistem kultural tersebut menjadi bagian dari sistem sosial dan personalitas.

Parson juga mendefinisikan kultur sebagai hubungan sistem tindakan dengan sistem lain. Jadi, sistem kultur merupakan sistem dengan simbol berpola dan teratur. Sistem tersebut menjadi orientasi actor, aspek sistem kepribadian terinternalisasi, dan pola-pola terlembaga pada suatu sistem sosial (Ritzer,2007:94). Parson menjelaskan pemberdayaan kultur merupakan hal penting setara dengan ketepatan waktu bekerja, kemampuan mengelola waktu, serta konsistensi berkinerja. Pemberdayaan tersebut membutuhkan pembangunan sistem sosial. Pandangan bahwa kultur bersifat simbolis juga memberikan pandangan lain, yaitu kemampuan sistem kultur mengendalikan sistem tindakan atau lainnya.

3. Sistem Kepribadian

Sistem kepribadian merupakan sistem yang dikendalikan oleh sistem kultural dan sosial. Parson menjelaskan sistem kepribadian sebagai sistem orientasi dan motivasi tindakan individu yang terorganisir. Kebutuhan yang muncul pada individu atau pelaku tersebut menyebabkan seorang individu menerima atau menolak suatu obyek yang berasal dari suatu lingkungan. Aktor atau individu tersebut juga bisa mencari objek baru bila dirinya tidak menemukan kepuasan yang dicarinya.

Parson membedakan tiga macam disposisi-kebutuhan atau kebutuhan yang muncul pada individu. Jenis pertama adalah dorongan actor untuk mendapatkan

cinta, persetujuan, dan hal lain dari suatu hubungan sosial. Jenis kedua merupakan internalisasi nilai agar pelaku mampu mengamati berbagai standard kultur. Jenis ketiga adalah peran agar aktor memberi atau menerima respon yang tepat (Ritzer,2007:389).

E. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh *Management Resources* DPMPD terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan di Kabupaten Kediri pada masa pandemi Covid 19 diungkapkan dalam konsep imperatif fungsional Talcott Parsons yang disebut AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency) dimana bisa dikatakan berhasil. Selain itu, memiliki keterikatan di dalam keinginan, ide, nilai maupun norma. Sistem aksi tersebut mempengaruhi sistem sosial, sistem kepribadian, sistem kebudayaan dari pegawai DPMPD. Hasil analisis pengaruh management resources DPMPD terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kediri pada masa pandemi Covid-19 memperoleh nilai signifikansi 0.000, R-square 0.659, dan nilai positif pada persamaan regresi sederhana. Jadi, management resource berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan dengan besar kontribusi 65.9%.

F. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dalam kelancaran penelitian ini, khususnya pihak Dinas DPMPD Kabupaten Kediri yang telah memberikan informasi secara keterbukaan serta dukungan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTKA

- Ahmad dkk. 2021. Implementasi Program Pemberdayaan desa (P2MD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* Vol 7 No 1.
- Amin,Fadillah. 2020. Pendekatan Bottom Up Budgeting dalam Penganggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial (JIMPKS)* Vol 4 No 2.
- Desbiolles, Freya Higgins. 2022. Decolonising Tourism and Development: From Orphanage Tourism to Community Empowerment in Cambodia. *Journal of Sustainable Tourism*
- Endah, Kiki. 2020. Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Moderat* Vol 6 No 1.
- Grathoff, Richard. 2000. *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons:Teori Aksi Sosial*. Jakarta: kencana.
- Hermawan, Endang dkk. 2021. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtawangungan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)* Vol 2 No 1.
- Isili, Alfarry Yudi dkk . 2022. Pengaruh Knowledge Sharing, Human Relation Dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulut Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal EMBA* Vol 10 No. 1.

- Izzuddin, Muhammad Alif dan Tjitjik Rahayu. 2022. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Pada Bidang Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Kelurahan Bujel Kota Kediri. *Publika* Vol 10 No. 2.
- Kurniawati, Dwi Pratiwi. 2020. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol 1 No. 4.
- Laksono, Bayu Adi & Nasyikatur Rohmah. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial dan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*. Vol. 14 No. 1.
- Nirwana. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (Pdpm) Kecamatan Palu Timur Di Kota Palu. *Jurnal Katalogis* Vol.1 No 7.
- Noor, Munawar.2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS* Vol. 1 No. 2
- Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di era Otonomi Daerah*. Malang: FIA Universitas Brawijaya.
- Nur, Askar et.al. 2022. Barru Literacy Community as the Alternative Literary Movement: Study on Cultivating Reading Literacy Toward Society in Barru Regency, South Sulawesi Province. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan* Vol.2 No. 1.
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol 11 No 1.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ritzer,George. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Silviana, Dayu dkk. 2021. Analisis Pengembangan Desa Wisata di Desa Sumber Urip, Rejang Lebong, Bengkulu. *JSA (Jurnal Sosiologi Andalas)* Vol. 7 No. 1
- Subiyakto, Bambang dkk. 2022. Community Economic Empowerment Though The Existence of Thematic Village. *The Innovative of Journal Studies Journal*. Vol. 4 (1)
- Sukmawati, Desi & Rina Maryanti. 2021. Development of Education and Economic Circulation in Supporting Local Potentiala as Community Empowerment Effort Amid the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research* 1 (2)
- Sulistiawati, Anjar dan Khoirun Nasution. 2022. Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Papeda* Vol 4, No 1.
- Sutopo, Dhanny Septimawan & Dania Nur Shabrina. 2022. Spektrum Perencanaan Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah Desa. *Jurnal Sosiologi Andalas* Vol 8 No. 1.
- Turama, Akhmad Rizqi. 2020. Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *Journal System UNPAM* Vol 2 No 1.
- Wardi, Bachtiar. 2010. *Sosiologi Klasik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Zikargae, Mekonnen Hailemariam et.al. 2022. Empowering Rural Society Though Non-Formal Environmental Education: An Empirical Study of Environmental and Forest Development Community Projects in Ethiopia. *Heliyon* 8.

